

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Asshidiqie ,Jimly, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demkrasi*, Penerbit Konstitusi Press, Jakarta
- Halim, Hamzah, 2009, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoretis dan Praktis disertai Manual)Konsepsi Teoretis Menuju Artikulasi Empiris*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta
- Hanitijo Soemitro, Ronny,1988,*Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Kusdarini ,Eny, 2011, *Dasar-dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Penerbit UNY Press,Yogyakarta
- M.Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2006, *Dualisme Penelitian Hukum*, FH UMY Yogyakarta
- Pahala Siahaan, Marihot, 2010, *Hukum Pajak Formal Pendaftaran, Pembayaran, Pelaporan, Penetapan, Penagihan, Penyelesaian Sengketa, dan Tindak Pidana Pajak*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta
- Purno Murtopo, Sjafardamsah, Tugiman Binsarjono, 2011, *Perpajakan Pendekatan Sertifikasi A-B-C Pemahaman Terapan dalam Kerangka*

- Hukum Pajak yang Komprehensif dapat membantu menjadi “Smarter Taxpayer”*, Penerbit Mitra Wacana Media
- Rusjdi,Muhammad, 2007, *Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*, Penerbit Indeks, Jakarta
- Safri Nurmantu, 2005, *Pengantar Perpajakan*, Granit, Jakarta
- Saptomo, Ade, 2007, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian Hukum*, Unesa University Press, Surabaya
- Soekanto,Soerjono,1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Soemitro, Rochmat dan Kania Sugiharti, Dewi, 2004, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Penerbit Refika Aditama, Bandung
- Wahyutomo,Imam, 1994, *Pajak*, UUP AMP YKPN, Yogyakarta
- Waluyo,2005, *Perpajakan Indonesia*, Penerbit Salemba Empat, Edisi 5, Jakarta

## **B. Skripsi**

- Larassita, Paramesty, 2013, *Kebijakan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa Angkut Gas LPG 3 Kilogram Setelah Diberlakukannya Konversi Atas Minyak Tanah Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, Skripsi, Program S1 FH UGM, Yogyakarta;
- Permana Sakti, Ardhy, 2012, *Kebijakan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa Perbankan di Kota Yogyakarta dalam Asas Kepastian Hukum*, Skripsi, Program S1 FH UGM, Yogyakarta

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4)

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain sebagai

Dasar Pengenaan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 158);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2012 tentang Jasa Angkutan

Umum di Darat dan Jasa Angkutan Umum di Air yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 554);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.32 Tahun 2016 tentang

Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 494);

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-321/PJ/2012

Surat Edaran Nomor SE-119/PJ/2010 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai

Atas Penyerahan Jasa Angkutan Umum di Jalan;

#### **D. Internet**

<http://www.indonesia.go.id/in/pemerintah-daerah/provinsi-di-yogyakarta/pariwisatadiakses> tanggal 11 Maret 2016

[http://fe.petra.ac.id/files/files/EK4232\\_fakturpajak\(7\).pdf](http://fe.petra.ac.id/files/files/EK4232_fakturpajak(7).pdf).diakses tanggal 11 Maret 2016

<http://www.pajak.go.id/sites/default/files/Leaflet%20Nomor%20Seri%20Faktur%20Pajak.pdf>. diakses tanggal 11 Maret 2016

[http://www.bppk.kemenkeu.go.id/bdk/cimahi/attachments/299\\_Memahami%20S](http://www.bppk.kemenkeu.go.id/bdk/cimahi/attachments/299_Memahami%20S)

ubsidi.pdf diakses tanggal 18 April 2016

<http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-wajib-pajak-dan-pengusaha-kena-pajak>

diakses tanggal 3 Maret 2016 pada jam 16.02 WIB

<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/12690->

kewajiban-penguksuhan-pkp-bagi-pengusaha-kecil-rekanan-pemerintah

diakses tanggal 3 Maret 2016

<http://www.pajak.go.id/content/seri-ppn-dan-ppnbm-tata-cara-pembayaran-dan->

penyetoran-ppn-dan-ppnbm?lang=en diakses tanggal 24 Februari 2016 jam

14.00